



TRANSPARANSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN PUBLIK TERHADAP PENURUNAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI ERA E-GOVERNMENT

Kamandanu Aji, Muchammad Izzal Wildan,

I Nengah Widya Adhi Pratama, Pandri Zulfikar

Program Pascasarjana, Universitas Islam Syekh-Yusuf

Abstrak

Korupsi merupakan permasalahan serius yang menghambat pembangunan nasional dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebagai salah satu langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah Indonesia menerapkan sistem E-Government. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi anggaran dan pengawasan publik terhadap penurunan tindak pidana korupsi di era E-Government. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi anggaran melalui sistem digital—seperti e-budgeting, e-planning, dan e-procurement—mampu meminimalisasi praktik manipulasi data dan penyalahgunaan wewenang karena menciptakan jejak digital yang terbuka bagi publik. Di sisi lain, pengawasan publik yang aktif melalui sarana digital bertindak sebagai kontrol sosial yang efektif dan menciptakan tekanan bagi aparatur negara untuk bekerja secara jujur. Meskipun demikian, implementasi ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah, budaya birokrasi yang tertutup, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi anggaran dan pengawasan publik yang kuat secara signifikan dapat menekan peluang korupsi, namun diperlukan penguatan sistem teknologi, peningkatan kualitas SDM, serta edukasi publik agar penerapan E-Government berjalan optimal.

Kata Kunci: E-Government, Transparansi Anggaran, Pengawasan Publik, Korupsi, Good Governance.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat pembangunan nasional, serta menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam konteks pemerintahan modern, korupsi sering terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan, rendahnya transparansi pengelolaan anggaran, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang sistematis melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah penerapan sistem E-Government (Nurlina, 2025). E-Government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas pelayanan publik. Kehadiran E-Government diharapkan mampu meminimalisasi praktik penyalahgunaan wewenang karena proses administrasi dan pengelolaan anggaran dilakukan secara digital, terbuka, dan dapat diakses oleh masyarakat. Sistem ini juga memungkinkan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran negara sehingga peluang terjadinya korupsi dapat ditekan.

Transparansi anggaran menjadi salah satu unsur penting dalam penerapan E-Government. Transparansi anggaran merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, hingga

pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat (Hardwick et al., 2018). Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana publik digunakan, program apa saja yang dilaksanakan, serta sejauh mana realisasi anggaran dilakukan. Keterbukaan tersebut menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya manipulasi anggaran, mark-up proyek, penggelapan dana, maupun penyalahgunaan jabatan oleh oknum pejabat pemerintah.

Dalam praktiknya, transparansi anggaran melalui sistem digital telah diterapkan di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah (Rofikoh, n.d.). Contohnya adalah penggunaan e-budgeting, e-procurement, dan sistem informasi keuangan daerah berbasis elektronik. Melalui sistem tersebut, proses pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan negara dapat dipantau secara terbuka. Hal ini tentu memberikan dampak positif terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi karena mempersempit ruang bagi praktik-praktik ilegal yang sebelumnya sering terjadi dalam sistem konvensional. Selain itu, transparansi berbasis teknologi juga meningkatkan efisiensi birokrasi serta mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat (Mutmainnah et al., 2023). Pengawasan publik merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengontrol kebijakan dan tindakan pemerintah agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip akuntabilitas. Dalam era demokrasi modern, masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga berperan sebagai subjek yang aktif mengawasi jalannya pemerintahan. Pengawasan publik dapat dilakukan melalui media massa, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, maupun masyarakat umum yang memanfaatkan akses informasi publik untuk melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah.

Perkembangan teknologi informasi di era E-Government semakin memperkuat peran masyarakat dalam melakukan pengawasan. Masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses data anggaran pemerintah melalui situs resmi pemerintah, aplikasi digital, maupun platform keterbukaan informasi publik. Selain itu, media sosial juga menjadi sarana efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, laporan, maupun dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur negara. Dengan adanya keterlibatan publik yang aktif, pemerintah akan lebih berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya karena setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat.

Namun demikian, implementasi transparansi anggaran dan pengawasan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua daerah memiliki sistem digital yang memadai untuk mendukung keterbukaan informasi anggaran. Selain itu, masih terdapat budaya birokrasi tertutup yang menyebabkan akses informasi publik menjadi terbatas. Rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi kendala dalam optimalisasi pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Di sisi lain, praktik korupsi yang semakin kompleks sering kali melibatkan penyalahgunaan teknologi sehingga membutuhkan sistem pengawasan yang lebih canggih dan terintegrasi.

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan transparansi anggaran dan pengawasan publik memiliki hubungan yang signifikan terhadap penurunan tingkat korupsi. Semakin terbuka suatu sistem pemerintahan, maka semakin kecil peluang terjadinya penyimpangan anggaran. Begitu pula dengan pengawasan publik yang aktif dapat menciptakan tekanan sosial dan politik bagi aparatur pemerintah untuk bekerja

secara jujur dan bertanggung jawab. Dengan demikian, transparansi dan pengawasan publik tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun budaya anti korupsi di lingkungan pemerintahan.

Dalam perspektif hukum dan administrasi negara, transparansi anggaran dan pengawasan publik merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas publik yang wajib diterapkan oleh setiap penyelenggara negara. Hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga menegaskan pentingnya prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, penerapan E-Government menjadi salah satu bentuk implementasi nyata dari prinsip-prinsip tersebut dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa transparansi anggaran dan pengawasan publik memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap upaya penurunan tindak pidana korupsi di era E-Government. Transparansi memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran negara, sedangkan pengawasan publik berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap tindakan pemerintah. Kedua aspek tersebut saling berkaitan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh transparansi anggaran dan

pengawasan publik terhadap penurunan tindak pidana korupsi menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan *E-Government* dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis pengaruh transparansi anggaran dan pengawasan publik terhadap penurunan tindak pidana korupsi di era *E-Government*. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran secara mendalam mengenai fenomena sosial, kebijakan pemerintah, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran publik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pihak yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan pengawasan publik, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, artikel, serta dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan transparansi anggaran, *E-Government*, dan tindak pidana korupsi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengelompokkan, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Melalui metode ini diharapkan dapat diketahui bagaimana penerapan transparansi anggaran dan pengawasan publik mampu berkontribusi dalam menekan tindak pidana korupsi di era

digital pemerintahan (Hardwick et al., 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi Anggaran dalam Era *E-Government*

Transparansi anggaran merupakan salah satu prinsip penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). (Goni et al., 2020). Berdasarkan hasil penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis berbagai kebijakan pemerintah, penerapan sistem digital dalam pengelolaan anggaran memiliki dampak positif terhadap pencegahan tindak pidana korupsi. Sistem elektronik mampu mengurangi praktik manipulasi data, penggelembungan anggaran (*mark-up*), serta penyalahgunaan wewenang yang sebelumnya sering terjadi dalam sistem administrasi konvensional. Dengan adanya transparansi, setiap penggunaan anggaran dapat dipantau oleh lembaga pengawas maupun masyarakat sehingga menciptakan kontrol yang lebih efektif terhadap aparatur pemerintah.

Selain itu, keterbukaan informasi anggaran juga meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah dituntut untuk menjelaskan penggunaan dana publik secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini secara tidak langsung menciptakan budaya birokrasi yang lebih jujur dan profesional. Dalam perspektif hukum administrasi negara, transparansi anggaran menjadi bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi transparansi anggaran masih menghadapi beberapa kendala. Tidak semua instansi pemerintah memiliki

infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung sistem digital secara optimal. Selain itu, masih terdapat aparatur pemerintah yang belum sepenuhnya siap menerapkan sistem berbasis elektronik karena keterbatasan kemampuan teknologi dan budaya birokrasi yang masih tertutup. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan sistem teknologi informasi agar transparansi anggaran dapat berjalan secara maksimal.

Pengawasan Publik terhadap Pencegahan Korupsi

Pengawasan publik merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengontrol kebijakan dan tindakan pemerintah. Dalam era *E-Government*, masyarakat memiliki akses yang lebih luas untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan anggaran negara sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih aktif (Dan & Daerah, 2022). Melalui media digital, masyarakat dapat memberikan kritik, laporan, maupun masukan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tindak pidana korupsi. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara, maka semakin kecil peluang aparatur pemerintah melakukan penyimpangan. Pengawasan publik juga menciptakan tekanan sosial bagi pejabat pemerintah untuk bekerja secara transparan dan bertanggung jawab karena setiap tindakan dapat diketahui oleh masyarakat luas.

Dalam praktiknya, pengawasan publik dilakukan melalui berbagai sarana seperti media massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, serta media sosial.

Kehadiran media sosial menjadi salah satu instrumen penting dalam pengawasan publik karena masyarakat dapat dengan cepat menyampaikan informasi mengenai dugaan penyimpangan anggaran atau tindakan korupsi. Selain itu, keterlibatan akademisi dan lembaga anti korupsi juga memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Meskipun demikian, efektivitas pengawasan publik masih dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan literasi masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang cukup mengenai sistem anggaran dan mekanisme pengawasan pemerintah. Kurangnya akses pendidikan dan literasi digital menyebabkan sebagian masyarakat belum mampu memanfaatkan teknologi secara optimal dalam melakukan pengawasan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi publik mengenai pentingnya pengawasan sosial terhadap penggunaan anggaran negara.

Transparansi Anggaran dan Pengawasan Publik terhadap Penurunan Korupsi

Berdasarkan hasil analisis kualitatif, transparansi anggaran dan pengawasan publik memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam upaya menurunkan tindak pidana korupsi. Transparansi memberikan akses informasi kepada masyarakat, sedangkan pengawasan publik berfungsi mengontrol penggunaan informasi tersebut untuk memastikan pemerintah bekerja sesuai aturan hukum dan prinsip akuntabilitas (Siti Khofifah Hanif et al., 2025).

Penerapan *E-Government* terbukti mampu mempersempit ruang terjadinya korupsi karena proses administrasi pemerintahan dilakukan secara digital dan terdokumentasi dengan baik. Sistem elektronik

menciptakan jejak digital (*digital trace*) yang memudahkan proses audit dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Dengan demikian, aparatur pemerintah menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan kewenangannya karena setiap tindakan dapat dilacak dan diawasi.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan publik mampu meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima layanan publik, tetapi juga sebagai pengawas terhadap jalannya pemerintahan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa transparansi anggaran dan pengawasan publik merupakan instrumen penting dalam mendukung keberhasilan *E-Government* untuk menekan tindak pidana korupsi. Semakin terbuka sistem pemerintahan dan semakin aktif partisipasi masyarakat dalam pengawasan, maka semakin besar peluang terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa transparansi anggaran dan pengawasan publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tindak pidana korupsi di era *E-Government*. Penerapan sistem digital seperti *e-budgeting*, *e-procurement*, dan sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik mampu meningkatkan keterbukaan serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Transparansi anggaran memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi penggunaan dana publik sehingga peluang terjadinya penyimpangan dan

penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisasi.

Selain itu, pengawasan publik juga berperan penting sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Partisipasi masyarakat melalui media massa, lembaga sosial, dan media digital dapat mendorong pemerintah untuk bekerja secara lebih jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Semakin aktif pengawasan masyarakat, maka semakin kecil peluang terjadinya praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian, implementasi transparansi anggaran dan pengawasan publik masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya terbuka. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem teknologi informasi, serta edukasi kepada masyarakat agar penerapan *E-Government* dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, Saya mampu melakukan penulisan karya tulis ini. Untuk menyelesaikan pekerjaan, Saya menyadari bahwa sangat sulit menyelesaikan kajian ilmiah ini tanpa keterlibatan pihak lain yang memberikan bimbingan dan arahan untuk penyelesaiannya. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada:

Saya mengerti dalam penulisan karya ilmiah ini masih banyak ditemukan kekurangan. Oleh sebab itu saya menerima kritik serta saran yang bertujuan untuk memperbaiki sangat diharapkan untuk perbaikannya. Terakhir dari saya sebagai penulis

mengucapkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan saya memiliki semoga kajian ilmiah kedepan dapat memberikan manfaat bagi orang lain yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Dan, P., & Daerah, B. (2022). *193-Article Text-101-1-10-20230819*. 2(1), 17-27.

Goni, I. S., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Transparansi Pengelolaan Anggaran Melalui Aplikasi Web Cerdas Epra Online (Ceo) Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 2(5), 1-11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/31424%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/download/31424/30083>

Hardwick, F. S., Akram, R. N., & Markantonakis, K. (2018). Fair and Transparent Blockchain Based Tendering Framework - A Step Towards Open Governance. *Proceedings - 17th IEEE International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications and 12th IEEE International Conference on Big Data Science and Engineering, Trustcom/BigDataSE 2018*, 1342-1347. <https://doi.org/10.1109/TrustCom/BigDataSE.2018.00185>

Mutmainnah, S., Nor, W., Rahardian, M., & Helmina, M. R. A. (2023). Determinan Tingkat Transparansi Anggaran Melalui Website Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 191-199. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art22>

Nurlina. (2025). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Penganggaran Publik. *Jurnal Manajemen Keuangan Sektor Publik*, 1(1), 39-51. <https://journal.uwais.ac.id/index.php/amanah/article/view/10>

Rofikoh, N. (n.d.). *Rofikoh, N. (2006)*.

Siti Khofifah Hanif, Lidya Vanya F. Sihombing, Yendita Pakpahan, Muhammad Yudi Fajri, & Alexa Angelica Nababan. (2025). Transparansi Anggaran Publik sebagai Pilar Good Governance pada Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 14895-14899. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4605>